

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali di kelurahan Purus saat ini, merupakan salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh. Keadaan inilah menjadikan tuntutan adanya penyediaan sarana dan prasarana perkotaan terutama kebutuhan akan hunian tempat tinggal dan infrastruktur pendukungnya. Dengan adanya masalah tersebut, Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan tentang penanganan permukiman kumuh.

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan permukiman tertuang didalam dokumen-dokumen yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Padang. Dokumen tersebut adalah dokumen RKP dan dokumen RP2KPKP. Kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang penanganan permukiman kumuh pelaksanaannya masih belum optimal. Dikarenakan keterbatasan anggaran, tidak adanya koordinasi dari dinas-dinas terkait penanganan permukiman kumuh dan sasaran kebijakan yang belum tepat sasaran.

Upaya Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang mengacu pada Undang-undang No. 01 Tahun 2011 tentang pembangunan perumahan dan permukiman dan berbagai kebijakan yang dibuat yang tercantum dalam renstra, dan RPJMD serta didukung oleh beberapa peraturan daerah Kota Padang khususnya di Kelurahan Purus. Implementasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam penanganan kawasan kumuh yaitu peremajaan. Bentuk pelaksanaan peremajaan ini bahwa Pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan indikator kumuh yaitu perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan penyediaan air bersih, dan rehab rumah yang tidak layak huni.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi dari penelitian ini sebagai berikut :

Pada penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh ini sebagian sudah dilaksanakan. Pada dasarnya kebijakan ini dibuat sudah sesuai dengan teori yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang pembangunan perumahan dan permukiman. Bahwa untuk penanganan permukiman kumuh ini dilakukan dengan cara salah satunya dengan peremajaan di Kelurahan Purus tersebut. Kegiatan peremajaan yang sudah dilakukan di Kelurahan Purus berupa jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan. Sedangkan yang tidak terlaksana adalah berupa kegiatan MCK Komunal.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, keterbatasan tersebut diantaranya :

1. Hasil penelitian sangat tergantung kepada kejujuran informan dalam menjawab pertanyaan penelitian
2. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada tentang implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Padang khususnya di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat. Sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kebijakan lain tentang penerapan kebijakan penanganan permukiman kumuh.

Dalam penelitian ini juga dilakukan dokumentasi dalam tahap wawancara dengan informan. Peneliti mengalami kendala dalam mendapatkan foto, ada beberapa informan yang menolak untuk didokumentasikan. Dan peneliti mengalami kendala saat ditemukannya kondisi ketidaksesuaian data dari dinas terkait di lapangan. Sehingga diperlukan upaya untuk pemerintah agar memberikan dokumen yang akurat.

D. Saran

Munculnya masalah permukiman kumuh di Kota Padang, khususnya di kelurahan Purus, Pemerintah Kota Padang membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan permasalahan saat ini. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang, dalam pengaplikasian kebijakan tersebut belum tepat sasaran. Sehingga perlu masukan untuk Pemerintah Kota Padang dalam pengaplikasian kebijakan penanganan permukiman kumuh. Hasil yang ditemukan di lapangan bahwa setiap data yang ditemukan dari beberapa dinas terkait penanganan permukiman kumuh

berbeda-beda. Kondisi ketidaksesuaian data yang ditemukan dilapangan bahwa tidak adanya laporan yang terkait dengan data tersebut oleh Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Seharusnya laporan tersebut ada oleh Pemerintah Kota Padang dan koordinasi satu sama lain oleh dinas terkait. Dengan hal tersebut tidak akan ditemukannya kondisi ketidaksesuaian data dan kebijakan program penanganan permukiman kumuh bisa menjadi tepat sasaran. Implementasi dari produk-produk pengaturan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh yang ada pada saat ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka masalah perumahan dan permukiman telah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota, maka upaya penanganan lingkungan permukiman kumuh perlu terus dikembangkan konsep penanganannya sesuai dengan kondisi permasalahan dan potensi lokal yang ada, yang implementasinya dilaksanakan secara multi sektoral, bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

- Perlu adanya konsistensi program Pemerintah Kota Padang dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Purus
- Kebijakan di sektor permukiman dapat lebih dipertajam serta terus dilakukan evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar bisa mendukung pembangunan sektor permukiman
- Pelaksanaan dalam penanganan permukiman kumuh Pemerintah Kota Padang harus bisa lebih terfokus sesuai dengan SK Walikota tentang lokasi kawasan kumuh.
- Pemerintah Kota Padang harus merangkul masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan oleh aparat dan dinas terkait tentang lingkungan yang sehat agar tidak terdapatnya kumuh di daerah tersebut.
- Masyarakat agar dapat mendukung kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang tanpa kumuh atas inisiatif sendiri.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun untuk itu diharapkan penelitian ini mampu memberi masukan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Purus, dan sebagai referensi bagi penelitian lain yang berminat untuk mengkaji kawasan kumuh.

